MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 675 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Visi Indonesia Emas, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, dan mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden yang dinamis, membutuhkan penambahan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 800);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 613 Tahun 2026 tentang Kebutuhan Aparatur Sipil Negara secara Nasional Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-191/MK.03/2026 tanggal 21 April 2026;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11832/B-BP.01.01/SD/K/2025 tanggal 31 Juli 2025;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-211/MK/SJ/2026 tanggal 19 November 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KETIGA : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 19 November 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 675 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
C	TENAGA TEKNIS		1915	
1	JURU MESIN KAPAL KELAS I	SMA/SEDERAJAT	43	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
2	JURU MESIN KAPAL KELAS I	SMA/SEDERAJAT	6	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
3	JURU MESIN KAPAL KELAS I	SMA/SEDERAJAT	34	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
4	JURU MESIN KAPAL KELAS I	SMA/SEDERAJAT	10	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
5	KELASI KAPAL KELAS I	SMA/SEDERAJAT	12	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
6	KELASI KAPAL KELAS I	SMA/SEDERAJAT	63	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
7	KELASI KAPAL KELAS I	SMA/SEDERAJAT	37	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
8	KELASI KAPAL KELAS I	SMA/SEDERAJAT	10	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
9	MASINIS II KAPAL KELAS I	D-III TEKNIKA	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
10	MASINIS II KAPAL KELAS I	D-III TEKNIKA	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
11	MASINIS II KAPAL KELAS I	D-III TEKNIKA	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
12	MUALIM II KAPAL KELAS I	D-III NAUTIKA	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
13	MUALIM II KAPAL KELAS I	D-III NAUTIKA	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
14	MUALIM II KAPAL KELAS I	D-III NAUTIKA	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI NAUTIKA
15	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN | BAGIAN MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO | SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO III
16	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN | BAGIAN STRATEGI ORGANISASI DAN PROSES BISNIS | SUBBAGIAN STRATEGI ORGANISASI
17	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ADVOKASI | BAGIAN ADVOKASI IV | SUBBAGIAN ADVOKASI IVB
18	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO SUMBER DAYA MANUSIA | BAGIAN PENGHARGAAN, PENEGAKAN DISIPLIN, PENSIUN, DAN REGULASI SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENEGAKAN DISIPLIN
19	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN | SUBBAGIAN ORGANISASI
20	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MATEMATIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN | SUBBAGIAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN II

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
21	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO HUKUM | BAGIAN HUKUM KEKAYAAN NEGARA DAN INFORMASI HUKUM | SUBBAGIAN HUKUM KEKAYAAN NEGARA I
22	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN | BAGIAN MANAJEMEN PENGADAAN | SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA I
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN ADVOKASI | SUBBAGIAN PEMANTAUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN ADVOKASI
24	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | BAGIAN UMUM, KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI | SUBBAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
25	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOG	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO SUMBER DAYA MANUSIA | BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN ASESMEN SUMBER DAYA MANUSIA
26	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN HUKUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
27	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENJAMINAN MUTU | BIDANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
28	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN | BIDANG PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SUBBIDANG PROGRAM DAN SISTEM KERJA
29	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA | S-1 MATEMATIKA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN | BIDANG PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SUBBIDANG PROGRAM DAN SISTEM KERJA
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN | BAGIAN TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK | SUBBAGIAN PELAYANAN PUBLIK
31	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO HUKUM | BAGIAN HUKUM PAJAK, KEPABEANAN, CUKAI DAN EVALUASI REGULASI | SUBBAGIAN HUKUM KEPABEANAN
32	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
33	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN MANAJEMEN INFORMASI DAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA
34	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
35	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO | BAGIAN KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI | SUBBAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN | BAGIAN ORGANISASI BIDANG ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN SEKTOR KEUANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL | SUBBAGIAN ORGANISASI BIDANG PERBENDAHARAAN DAN SEKTOR KEUANGAN
37	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | DIREKTORAT STRATEGI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
38	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN ORGANISASI
39	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN | BIDANG EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI | SUBBIDANG EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN FISKAL DAN SEKTOR KEUANGAN
40	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN | BAGIAN ORGANISASI BIDANG PENERIMAAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN JABATAN FUNGSIONAL | SUBBAGIAN ORGANISASI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN
41	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MATEMATIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL DAN HUKUM | SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL
42	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI SYARIAH	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL II
43	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERBANKAN, PASAR KEUANGAN, DAN PEMBIAYAAN LAINNYA | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
44	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PENGANGGARAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
45	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN PENGELOLAAN RISIKO ORGANISASI
46	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	42	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR | SUBDIREKTORAT KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI | SEKSI ANALISIS KOMPETENSI PEGAWAI
47	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN KOMUNIKASI | SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
48	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	200	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR | SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI ORGANISASI | SEKSI PERENCANAAN STRATEGIS
49	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	30	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA | SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN PIUTANG NEGARA | SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN PIUTANG NEGARA IV
50	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN | S-1 ILMU ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | KEUANGAN DAN PERBANKAN | S-1 EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN | S-1 ADMINISTRASI KEUANGAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
51	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN TATA LAKSANA
52	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN | SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN STRATEGI SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN | SEKSI PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENJAMINAN MUTU SISTEM INFORMASI
53	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | D-IV KEARSIPAN | D-IV KEARSIPAN DIGITAL	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER SUMBER DAYA MANUSIA
54	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN HARMONISASI DAN ADVOKASI HUKUM
55	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MATEMATIKA | S-1 STATISTIK | S-1 ILMU STATISTIK | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	6	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN | SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SAINS DATA DAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN | SEKSI PENGELOLAAN SAINS DATA PERBENDAHARAAN II

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
56	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN TALENTA
57	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI | BAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI | SUBBAGIAN STRATEGI KOMUNIKASI
58	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	11	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN | BAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA | SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA III
59	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 SISTEM INFORMASI	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PROSES BISNIS
60	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
61	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN | BIDANG PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SUBBIDANG PROGRAM DAN SISTEM KERJA
62	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | SUBBAGIAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
63	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ADVOKASI | BAGIAN ADVOKASI IV | SUBBAGIAN ADVOKASI IVA
64	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | BAGIAN UMUM | SUBBAGIAN KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI
65	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA
66	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | SUBBAGIAN TATA LAKSANA
67	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI | BAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI | SUBBAGIAN MONITORING DAN ANALISIS BERITA
68	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 SAINS DATA	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | DIREKTORAT SISTEM PERIMBANGAN KEUANGAN | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
69	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN | BAGIAN STRATEGI ORGANISASI DAN PROSES BISNIS | SUBBAGIAN PROSES BISNIS I
70	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT PENGAWASAN PERPAJAKAN | SUBDIREKTORAT PENGAWASAN WAJIB PAJAK KEWILAYAHAN | SEKSI TEKNIS PENGAWASAN WAJIB PAJAK KEWILAYAHAN
71	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MATEMATIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	6	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT KERJA SAMA REGIONAL DAN BILATERAL | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
72	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | BAGIAN UMUM | SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
73	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ADMINISTRASI NIAGA | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | SUBDIREKTORAT ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENDAPATAN NEGARA | SEKSI ANALISIS DAN KONSOLIDASI PENYUSUNAN POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
74	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PERPAJAKAN | S-1 ILMU ADMINISTRASI FISKAL | D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERBANKAN, PASAR KEUANGAN, DAN PEMBIAYAAN LAINNYA | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
75	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO HUKUM | BAGIAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN DAN PERJANJIAN | SUBBAGIAN HUKUM PERJANJIAN
76	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN | BAGIAN PERENCANAAN | SUBBAGIAN PERENCANAAN I
77	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN | BAGIAN PERBENDAHARAAN | SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN III
78	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | DIREKTORAT STRATEGI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
79	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO SUMBER DAYA MANUSIA | BAGIAN PENGHARGAAN, PENEGAKAN DISIPLIN, PENSIUN, DAN REGULASI SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN REGULASI SUMBER DAYA MANUSIA
80	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI PROGRAM DAN SISTEM KERJA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
81	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO | DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
82	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO ORGANISASI
83	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
84	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
85	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
86	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO | DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI PROGRAM DAN SISTEM KERJA
87	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT KERJA SAMA MULTILATERAL DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI PROGRAM DAN SISTEM KERJA
88	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	11	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, KOMUNIKASI, DAN LAYANAN INFORMASI | SUBBAGIAN HARMONISASI DAN ADVOKASI HUKUM
89	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PERENCANAAN ANGGARAN
90	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | DIREKTORAT STRATEGI STABILISASI EKONOMI | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI PROGRAM DAN SISTEM KERJA
91	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | DIREKTORAT STRATEGI PERPAJAKAN | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
92	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJAMEN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | DIREKTORAT STRATEGI STABILISASI EKONOMI | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
93	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 MATEMATIKA | S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S-1 KIMIA | S-1 FARMASI | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 PSIKOLOGI	53	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | SUBBAGIAN MUTASI KEPEGAWAIAN
94	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKTUARIA	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERBANKAN, PASAR KEUANGAN, DAN PEMBIAYAAN LAINNYA | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
95	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	12	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | PUSAT MANAJEMEN TRANSFORMASI DAN PERUBAHAN | BIDANG PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SUBBIDANG MANAJEMEN PENGETAHUAN
96	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI | BAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI | SUBBAGIAN RISET DAN AUDIT
97	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 SISTEM INFORMASI	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERBANKAN, PASAR KEUANGAN, DAN PEMBIAYAAN LAINNYA | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
98	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN | BAGIAN TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK | SUBBAGIAN TATA KELOLA BIDANG PENERIMAAN NEGARA DAN DUKUNGAN MANAJEMEN
99	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI PROGRAM DAN SISTEM KERJA
100	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERBANKAN, PASAR KEUANGAN, DAN PEMBIAYAAN LAINNYA | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
101	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN HARMONISASI DAN ADVOKASI HUKUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
102	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT PENGEMBANGAN DANA PENSIUN, ASURANSI, DAN AKTUARIA | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
103	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | PUSAT MANAJEMEN TRANSFORMASI DAN PERUBAHAN | BIDANG PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SUBBIDANG MANAJEMEN PENGETAHUAN
104	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | DIREKTORAT STRATEGI KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
105	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM | S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL | DIREKTORAT STRATEGI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI PROGRAM DAN SISTEM KERJA
106	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PERENCANAAN ANGGARAN
107	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
108	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | PUSAT MANAJEMEN TRANSFORMASI DAN PERUBAHAN | BIDANG PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SUBBIDANG MANAJEMEN PENGETAHUAN
109	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN | BAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA | SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA I
110	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO ADVOKASI | BAGIAN ADVOKASI III | SUBBAGIAN ADVOKASI IIIB
111	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
112	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL DAN HUKUM | SUBBAGIAN HUKUM DAN ETIKA
113	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI	7	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | SUBBAGIAN ORGANISASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
114	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI KEUANGAN | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI MANAJEMEN PENGETAHUAN
115	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO HUKUM | BAGIAN HUKUM ANGGARAN, PERIMBANGAN KEUANGAN, PERBENDAHARAAN, DAN BADAN LAYANAN UMUM | SUBBAGIAN HUKUM PERIMBANGAN KEUANGAN
116	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (IESP) | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN | BAGIAN HARMONISASI KEBIJAKAN, ADVOKASI, DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA | SUBBAGIAN HARMONISASI KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH
117	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN | BIDANG EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI | SUBBIDANG EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DAYA APARATUR DAN PENGAWASAN
118	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
119	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MATEMATIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL DAN HUKUM | SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO ORGANISASI
120	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ADMINISTRASI NIAGA | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	15	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA DAN MUTASI SUMBER DAYA MANUSIA
121	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 ARSITEKTUR	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
122	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PERPAJAKAN | S-1 AKUNTANSI PERPAJAKAN | S-1 ILMU ADMINISTRASI FISKAL | D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	145	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN | SUBDIREKTORAT RISIKO KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SAINS DATA | SEKSI MITIGASI DAN EVALUASI RISIKO
123	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL
124	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PENGANGGARAN
125	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM | S-1 HUKUM	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | SUBBAGIAN ORGANISASI
126	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN KOMUNIKASI | SUBBAGIAN TATA LAKSANA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
127	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA | SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN | SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN IV
128	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI | S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	21	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN SISTEM INFORMASI | SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI BISNIS DAN ANALISIS DATA | SEKSI TRANSFORMASI KEKAYAAN NEGARA
129	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN (IESP) | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN MUTASI SUMBER DAYA MANUSIA
130	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN II
131	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MATEMATIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
132	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN KOMUNIKASI | SUBBAGIAN ORGANISASI
133	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | D-IV KEARSIPAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN KEPATUHAN, KINERJA, DAN HUKUM | SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL
134	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM | S-1 ILMU HUKUM	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI
135	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | DIREKTORAT POTENSI DAN PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SEKSI PROGRAM DAN SISTEM KERJA
136	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNGAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN | SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN | SEKSI ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN I
137	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI | S-1 ILMU PSIKOLOGI	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN | SUBDIREKTORAT TEKNIK DAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN | SEKSI TEKNIK PEMERIKSAAN
138	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI | S-1 ILMU PSIKOLOGI	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI
139	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 TEKNIK KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA	86	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN | SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN TRANSAKSI KHUSUS | SEKSI PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
140	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MATEMATIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 SAINS DATA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN MANAJEMEN KARIER DAN TALENTA
141	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL DAN HUKUM | SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO ORGANISASI
142	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-IV MANAJEMEN PERKANTORAN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN | BAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA I
143	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PERPAJAKAN | S-1 ADMINISTRASI FISKAL | S-1 AKUNTANSI PERPAJAKAN | D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN | BAGIAN PENGAWASAN PAJAK | SUBBAGIAN PENGAWASAN PAJAK I
144	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-IV MANAJEMEN PERKANTORAN	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL
145	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	15	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN | SUBDIREKTORAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PELAKSANAAN ANGGARAN | SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN
146	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | SUBBAGIAN ORGANISASI
147	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
148	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI | BAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI | SUBBAGIAN STRATEGI KOMUNIKASI
149	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN LOGISTIK | S-1 TEKNIK LOGISTIK | D-IV LOGISTIK PERDAGANGAN NASIONAL | D-IV LOGISTIK BISNIS	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
150	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 STATISTIKA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 ILMU STATISTIK | S-1 SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA | S-1 STATISTIK	80	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I | SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI | SEKSI PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI III
151	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN PENGELOLAAN RISIKO ORGANISASI
152	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUBBAGIAN PERENCANAAN ANGGARAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
153	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER	15	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | BIDANG PROGRAM DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | SUBBIDANG MANAJEMEN PENGETAHUAN
154	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | D-IV KEARSIPAN	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN | SUBBAGIAN ORGANISASI
155	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | D-IV ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-IV MANAJEMEN PERKANTORAN	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN | SUBBAGIAN PROSES BISNIS
156	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN | D-IV MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI	23	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN | SUBDIREKTORAT EKSTENSIFIKASI | SEKSI EVALUASI EKSTENSIFIKASI
157	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	15	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN | SUBDIREKTORAT PENILAIAN II | SEKSI PENILAIAN INDIVIDU PERTAMBANGAN
158	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER	16	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA | SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA I | SEKSI PERUMUSAN KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA IB
159	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 MATEMATIKA | S-1 STATISTIKA | S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 SAINS DATA | S-1 TEKNOLOGI SAINS DATA	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI
160	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI | S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN	12	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO ORGANISASI
161	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | SEKRETARIAT BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN | BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL | SUBBAGIAN ORGANISASI
162	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU KOMPUTER	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN KEPATUHAN, KINERJA, DAN HUKUM | SUBBAGIAN MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
163	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | INSPEKTORAT JENDERAL | SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL | BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KARIER DAN TALENTA
164	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN | BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA | SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA III
165	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | SEKRETARIAT JENDERAL | BIRO UMUM | BAGIAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DAN DUKUNGAN PIMPINAN | SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
166	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	D-III TEKNIK INFORMATIKA | D-III ILMU KOMPUTER | D-III TEKNOLOGI INFORMASI | D-III TEKNIK KOMPUTER	10	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI | SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI I
167	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	D-III KIMIA | D-III FARMASI	8	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I | BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
168	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	D-III MULTIMEDIA	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA | SUBDIREKTORAT PUBLIKASI | SEKSI PENGELOLAAN PUBLIKASI LAINNYA
169	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	D-III SISTEM INFORMASI | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI	10	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI | SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI II
170	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	D-III KIMIA | D-III FARMASI	7	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS I MEDAN | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
171	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI KEBERATAN DAN BANDING
172	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LUWUK | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
173	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SAMARINDA | SEKSI PERBENDAHARAAN
174	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KOTABARU | SEKSI PERBENDAHARAAN
175	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
176	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI BIMBINGAN KEPATUHAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
177	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PEMERIKSAAN
178	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SUMBAWA | SEKSI PERBENDAHARAAN
179	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
180	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B KUPANG | SEKSI PENGELOLAAN KAPAL, TELEKOMUNIKASI, DAN SARANA PENDUKUNG
181	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN
182	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MOROWALI | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
183	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MANADO | SEKSI PERBENDAHARAAN
184	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TIMIKA | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
185	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
186	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LHOKSEUMAWE | SEKSI PERBENDAHARAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
187	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL
188	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KUPANG | SEKSI PERBENDAHARAAN
189	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B DUMAI | SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
190	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SORONG | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
191	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI III
192	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B JAMBI | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V
193	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SAMPIT | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
194	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PANGKALAN BUN | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
195	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | BIDANG PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN | SEKSI PENYIDIKAN I
196	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C FAKFAK | SEKSI PERBENDAHARAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
197	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BANDA ACEH | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
198	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TELUK NIBUNG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
199	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C ENTIKONG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
200	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASAR | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
201	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B JAMBI | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I
202	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SUMBAWA | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
203	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C FAKFAK | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
204	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
205	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B JAMBI | SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
206	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
207	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
208	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
209	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
210	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
211	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
212	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
213	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
214	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
215	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
216	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PERBENDAHARAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
217	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI VI
218	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I
219	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V
220	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
221	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | BIDANG KEPATUHAN INTERNAL | SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
222	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KUPANG | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
223	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B ATAMBUA | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
224	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B ATAMBUA | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI III
225	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	1	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENINDAKAN I
226	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | BIDANG KEPATUHAN INTERNAL | SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
227	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C ENTIKONG | SEKSI PERBENDAHARAAN
228	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TARAKAN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
229	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DATA
230	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANDAR LAMPUNG | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
231	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS III
232	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS I
233	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KETAPANG | SEKSI PERBENDAHARAAN
234	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANJARMASIN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI III
235	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B DUMAI | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN
236	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KOTABARU | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
237	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PANGKALPINANG | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
238	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS II
239	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KETAPANG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
240	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENINDAKAN I
241	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANJARMASIN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
242	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANJARMASIN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I
243	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS III
244	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PANGKALAN BUN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
245	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SANGATTA | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
246	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENINDAKAN II

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
247	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENINDAKAN II
248	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SUMBAWA | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
249	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
250	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PANGKALPINANG | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
251	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMK KIMIA | SMK KIMIA INDUSTRI | SMK ANALIS KIMIA	6	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I | BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA | SEKSI TEKNIS LABORATORIUM
252	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
253	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI PERBENDAHARAAN
254	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B ATAMBUA | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
255	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SABANG | SEKSI PERBENDAHARAAN
256	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SABANG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
257	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM | SEKSI TEKNIK DAN PEMELIHARAAN KAPAL
258	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	8	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
259	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B LHOKSEUMAWE | SEKSI PENGAWAKAN
260	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	8	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
261	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
262	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	8	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
263	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
264	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
265	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
266	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	8	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
267	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	16	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
268	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B ATAMBUA | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL
269	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
270	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI INTELIJEN
271	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	8	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
272	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
273	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENINDAKAN II
274	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN | SEKSI ADMINISTRASI MANIFES
275	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
276	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LHOKSEUMAWE | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
277	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	8	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
278	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
279	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMK KIMIA | SMK KIMIA INDUSTRI | SMK ANALIS KIMIA	20	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN | SEKSI TEKNIS LABORATORIUM
280	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
281	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	3	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
282	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
283	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
284	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	7	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
285	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
286	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
287	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
288	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	5	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
289	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMK KIMIA | SMK KIMIA INDUSTRI | SMK ANALIS KIMIA	20	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MEDAN | SEKSI TEKNIS LABORATORIUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
290	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
291	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	4	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
292	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI VI
293	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN | SEKSI PERBENDAHARAAN
294	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
295	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
296	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | BIDANG PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN | SEKSI PENYIDIKAN I
297	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI KEBERATAN DAN BANDING
298	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I
299	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
300	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BENGKALIS | SEKSI PERBENDAHARAAN
301	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | BIDANG PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN | SEKSI PENYIDIKAN II
302	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS II
303	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANJARMASIN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V
304	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG | SEKSI PERBENDAHARAAN
305	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANTEN | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS III
306	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BIAK | SEKSI PERBENDAHARAAN
307	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TERNATE | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
308	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C NUNUKAN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
309	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI VII

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
310	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MALILI | SEKSI PERBENDAHARAAN
311	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI NARKOTIKA DAN BARANG LARANGAN
312	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI NARKOTIKA DAN BARANG LARANGAN
313	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BONTANG | SEKSI PERBENDAHARAAN
314	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS I
315	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TUAL | SEKSI PERBENDAHARAAN
316	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PEMERIKSAAN
317	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DATA
318	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I
319	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI II
320	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BITUNG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
321	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C AMBON | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
322	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KUALA TANJUNG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
323	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | BIDANG KEPATUHAN INTERNAL | SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
324	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
325	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V
326	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BONTANG | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
327	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN
328	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MOROWALI | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
329	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MEULABOH | SEKSI PERBENDAHARAAN
330	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
331	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I
332	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASAR | SEKSI PERBENDAHARAAN
333	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PANTOLOAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
334	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TUAL | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
335	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MERAUKE | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
336	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DATA
337	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI KEBERATAN DAN BANDING
338	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V
339	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK | SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
340	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENINDAKAN II

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
341	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MOROWALI | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
342	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MERAUKE | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
343	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B JAMBI | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IV
344	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANJARMASIN | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN
345	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SANGATTA | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
346	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI PENGELOLAAN KAPAL DAN SARANA PENDUKUNG
347	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C GORONTALO | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
348	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BIAK | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
349	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B SORONG | SEKSI PENGAWAKAN
350	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI BANTUAN HUKUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
351	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BENGKULU | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
352	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH | BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS I
353	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KOTABARU | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
354	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TARAKAN | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI VI
355	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | SEKSI FASILITAS KEPABEANAN I
356	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASAR | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V
357	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B DUMAI | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V
358	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C FAKFAK | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
359	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN
360	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	6	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
361	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C GORONTALO | SEKSI PERBENDAHARAAN
362	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C AMBON | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
363	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS PAPUA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C FAKFAK | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
364	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI III
365	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN BARAT | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI INTELIJEN
366	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V
367	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I
368	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR | BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN | SEKSI PENINDAKAN I
369	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASAR | SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI VI
370	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
371	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BANJARMASIN | SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
372	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LUWUK | SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENYULUHAN
373	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU | PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN | SEKSI TELEKOMUNIKASI DAN PENGINDERAAN
374	PETUGAS LALU LINTAS BARANG IMPOR, EKSPOR, DAN BARANG KENA CUKAI	SMA/SEDERAJAT	2	KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN UTARA | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C GORONTALO | SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI